

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan suatu negara yang dilihat dari bertambahnya produksi barang industri, berkembangnya infrastruktur, bertambahnya sekolah, bertambahnya produksi barang dan modal, serta bertambahnya sektor jasa. Pertumbuhan ekonomi memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya.

Menurut Adam Smith Pertumbuhan Ekonomi adalah perubahan tingkat ekonomi pada suatu negara yang bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk maka output atau hasil dari suatu negara akan ikut bertambah.

Menurut Menurut Boedino (2013) Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi di tekankan pada tiga aspek utama yaitu Proses, Output perkapita, dan Jangka panjang. Pertumbuhan tersebut memiliki sifat self generating yang mampu melahirkan suatu momentum atau kekuatan untuk keberlangsungan pertumbuhan ekonomi pada periode selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.

Tabel 1.1
Data Pertumbuhan Ekonomi (persen)
7 Kota di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2015-2019

Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Padang	6.41	6.17	6.23	6.06	5.65
Kota Solok	5.97	5.76	5.76	5.65	5.49
Sawahlunto	6.03	5.72	5.74	5.50	5.31
Padang Panjang	5.91	5.80	5.80	5.71	5.56
Bukittinggi	6.14	6.05	6.08	6.00	5.84
Payakumbuh	6.19	6.08	6.12	6.02	5.89
Pariaman	5.79	5.59	5.61	5.47	5.30
Total	42.44	41.17	41.34	40.41	39.04

Sumber data : Badan Pusat Statistik (2019)

Pada Tabel 1.1 di atas Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan 7 Kota di Provinsi Sumatra Barat dari tahun 2015-2019 rata-rata mengalami fluktuasi. Dimana data tertinggi pada tahun 2015 rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kota di Provinsi Sumatra Barat sebesar 6,06 persen. Sedangkan pada tahun 2019 rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kota di Provinsi Sumatra Barat terendah sebesar 5,58 persen. Tahun 2016 rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 7 Kota di Provinsi Sumatra Barat yaitu sebesar 5,88 persen, meningkat di tahun 2017 yaitu sebesar 5,91 persen sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 5,78 persen

Pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan trend yang meningkat dan mantap dari tahun ke tahun. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan

dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi (BPS Sumatra barat , 2012).

Demikian juga halnya dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, tampak bahwa ada kecenderungan penurunan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2015. Kondisi tersebut tentunya perlu diwaspadai untuk masa yang akan datang, terutama dalam pemanfaatan peluang bonus demografi agar dapat dimanfaatkan menjadi momen bagi kebangkitan ekonomi daerah dan bukannya menjadi beban perekonomian di wilayah ini pada masa depan. Sumatra Barat adalah satu provinsi yang terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi yang terletak dari pulau Sumatra yang sampai saat ini terus melakukan dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta perekonomiannya dengan tujuan untuk mencapai masyarakat Sumatra barat yang hidup dan sejahtera, Sumatra barat senantiasa melakukan peningkatan pertumbuhan ekonominya.

Berdasarkan data Susenas BPS, Jumlah angkatan kerja yang bekerja di Indonesia kurang dari 95%, hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang ada di Indonesia belum terserap secara maksimal. Masih kurangnya keterserapan angkatan kerja di Indonesia bisa juga terjadi akibat adanya permasalahan sosial dan keterbelakangan serta juga dari kualitas angkatan kerja itu sendiri dilihat dari skill dan latar belakang stabil. Berikut ini data partisipasi angkatan kerja 7 Kota di Provinsi Sumatra Barat :

Tabel 1.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)
7 Kota di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2015-2019

Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Padang	58,92	59,413	61,15	62,78	61,98
Kota Solok	66,18	67,31	66,29	64,76	62,51
Kota Sawahlunto	69,91	70,61	70,44	72,88	69,83
Kota Padang Panjang	66,13	65,16	64,17	66,17	69,05

Kota Bukittinggi	67,59	65,55	65,23	69,15	65,55
Kota Payakumbuh	69,85	70,6	71,42	70,81	68,76
Kota Pariaman	64,95	65,67	65,2	67	69,36
Total	463.53	404.9	463.9	473.55	467.04

Sumber data : Badan Pusat Statistik Sumatra Barat

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas menunjukkan Tingkat Partisipasi Kerja (PTAK) berdasarkan 7 Kota di Provinsi Sumatra Barat tahun 2015-2019 mengalami peningkatan per tahun 2015-2019. Rata-rata TPAK tertinggi per tahun 2016-2019 terdapat pada tahun 2019 yaitu sebesar 66,72. Pada tahun 2019 Kota Provinsi dengan TPAK tertinggi yaitu Kota Sawahlunto dengan TPAK 69,83, sedangkan yang terendah yaitu Kota Padang dengan TPAK 61,98.

Selain pengeluaran konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional. Di Indonesia, pengeluaran konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 60-75 persen dari pendapatan nasional. Konsumsi rumah tangga juga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi darisatu waktu ke waktu lainnya. Sementara itu dalam jangka panjang pola konsumsi masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2013:173)

Perilaku konsumsi di masyarakat menengah atas perlahan juga mengalami perubahan, salah satunya kecenderungan masyarakat mulai bergeser konsumsinya dari *non-leisure* ke *leisure*. Pengeluaran masyarakat kini lebih banyak digunakan untuk hiburan dan *leisure* atau jalan-jalan serta mencari pengalaman dengan berwisata. semakin banyak masyarakat yang mengurangi konsumsinya (*non-leisure*) dan menyisihkan pendapatan, masyarakat memilih untuk menabung dan digunakan untuk berwisata atau mencari pengalaman.

Menurut Keynes dalam Samuelson, (1995) Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengeluaran untuk konsumsi dengan teori siklus hidup dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor subyektif dan faktor-faktor lain yang bersifat objektif. Faktor subyektif merupakan faktor -faktor fisiologis yang merupakan permintaan rumah tangga atas barang dan jasa yaitu

sikap para pembeli dipengaruhi oleh iklan, daya tarik produk yang bersangkutan dan persepsi konsumen terhadap harga produk yang akan dibeli. Berikut ini data konsumsi 7 Kota di Provinsi Sumatra Barat:

Tabel 1.3
Rata-rata Pengeluaran per-Kapita Sebulan Makanan dan Non Makanan
7 Kota di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2015-2019 (Rupiah)

Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Padang	1,179,578	1,387,465	1,461,122	1,645,328	1,579,957
Kota Solok	1,160,864	1,211,642	1,196,221	1,327,404	1,405,295
Sawahlunto	972,316	1,037,345	1,113,836	1,177,534	1,196,358
Padang Panjang	1,224,760	1,425,011	1,342,443	1,326,336	1,556,640
Bukittinggi	1,320,529	1,309,600	1,432,560	1,454,271	1,632,844
Payakumbuh	1,186,371	1,250,424	1,243,171	1,325,403	1,431,848
Pariaman	946,826	1,153,156	1,218,362	1,280,498	1,310,826
Total	6,074,021.14	8,774,643.00	9,007,715.00	9,536,774.00	10,113,768.00

Sumber data : Badan Pusat Statistik (2019)

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas menunjukkan rata-rata Pengeluaran per-Kapita sebulan makan dan non makan 7 Kota di Provinsi Sumatra Barat tahun 2015-2019 mengalami kenaikan, kita bisa lihat dari Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga di Kota Provinsi Sumatra Barat tertinggi yaitu tahun 2019 sebesar Rp.1,444,824.00. Sedangkan Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga terendah pada tahun 2015 berjumlah Rp.1,141,606.29.

Jumlah penduduk yang besar dianggap oleh sebagian ahli ekonomi merupakan penghambat pembangunan. Mulyadi, (2000) menyatakan bahwa tingginya angka pertumbuhan penduduk yang terjadi di negara sedang berkembang seperti Indonesia dapat menghambat proses pembangunan. Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang makin besar pula. Ini berarti semakin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan

keinginan serta keterampilan mereka. Berikut ini data jumlah penduduk 7 Kota di Provinsi di Sumatra barat :

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk
7 Kota Provinsi di Sumatra Barat Tahun 2015-2019 (Ribuan Jiwa)

Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Padang	902,41	914,97	927,00	939,11	950,87
Kota Solok	66,11	67,31	68,60	69,78	71,01
Sawahlunto	60,19	60,78	61,40	61,90	62,52
Padang Panjang	50,88	51,71	52,42	52,99	53,69
Bukittinggi	122,62	124,72	126,80	128,78	130,77
Payakumbuh	127,83	129,81	131,82	133,70	135,57
Pariaman	84,71	85,69	86,62	87,63	88,50
Total	1,414.75	1,434.99	1,454.66	1,473.89	1,492.93

Sumber data : Badan Pusat Statistik (2019)

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas menunjukkan jumlah penduduk (laki laki + perempuan) di wilayah 7 Kota di Provinsi Sumatra Barat dengan Rata-Rata dari tahun 2015-2019 yang mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dari tabel di atas pada tahun 2015 jumlah penduduk sebesar 902.41 ribuan jiwa dan pada tahun 2016 Rata-rata jumlah penduduk mengalami peningkatan yang begitu besar yaitu 914.97 ribuan jiwa. Tahun 2017 rata-rata jumlah penduduk yaitu sebesar 927,00 ribuan jiwa, tahun 2018 sebesar 939,11 ribuan jiwa dan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 950,87 ribuan jiwa.

Kemiskinan Merupakan salah satu persoalan yang mendasar dan menjadi pusat perhatian. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak Negara berkembang yang mencakup lebih dari satu miliar penduduk dunia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Menurut Munir (2002), suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita rendah, tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, sebagian besar tenaga kerja bergerak di sektor pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, dimana para pemilik

modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang serba kekurangan modal. Disamping itu akses untuk mendapatkan bantuan modal ke perbankan juga lebih memihak kepada para pengusaha besar dibandingkan dengan pengusaha ekonomi lemah.

**Tabel 1.5 Persentase Kemiskinan
7 Kota di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2015-2019 (persen)**

Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Padang	4,93	4,68	4,74	4,7	4,48
Kota Solok	4,12	3,86	3,66	3,3	3,24
Sawahlunto	2,22	2,21	2,01	2,39	2,17
Padang Panjang	6,74	6,75	6,17	5,88	5,6
Bukittinggi	5,36	5,48	5,35	4,92	4,6
Payakumbuh	6,67	6,46	5,88	5,77	5,68
Pariaman	5,42	5,23	5,2	5,03	4,76
Total	35.46	34.67	33.01	31.99	30.53

Sumber data : Badan Pusat Statistik (2019)

Berdasarkan Tabel 1.5 menunjukan Kemiskinan 7 di Kota Provinsi Sumatra Barat cukup mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2019, Pada tahun 2016 Kemiskinan tertinggi di Sumatra Barat berada pada Kota Padang Panjang sebesar 6,75 %, sementara yang terendah pada tahun 2017 berada pada Kota Sawahlunto Sebesar 2,01 %. Dan jika di lihat dari Rata-rata Kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan kemiskinan tiap tahunnya hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah sangat bagus dalam pengurangan kemiskinan di Sumatra Barat yaitu dengan cara bantuan social, bantuan pendidikan dan bantuan modal untuk masyarakat setempat.

Dari kondisi diatas menyebabkan timbulnya permasalahan maka penulis melakukan penelitian dengan judul’’ **Pengaruh Tenaga Kerja, Konsumsi, Jumlah Penduduk Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Provinsi Sumatra Barat’’**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota Provinsi Sumatra Barat ?
2. Bagaimana pengaruh Konsumsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota Provinsi Sumatra Barat ?
3. Bagaimana Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota Provinsi Sumatra Barat ?
4. Bagaimana Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota Provinsi Sumatra Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang :

1. Pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Provinsi Sumatra Barat.
2. Pengaruh Konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Provinsi Sumatra Barat.
3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Provinsi Sumatra Barat.
4. Pengaruh Kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Provinsi Sumatra Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh Tenaga kerja , Konsumsi, jumlah penduduk, kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa Kabupaten atau Kota di Provinsi di wilayah Sumatra Barat, maka dalam penelitian ini diharapkan hasil penelitian yang di dapatkan bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
2. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah (instansi terkait) dan pihak-pihak yang memerlukannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian yang memiliki hubungan serupa.